

PRESS BRIEF

Diskusi Publik INDEF

“Daya Beli Tertekan, Ketahanan Ekonomi Dipertaruhkan”

Jakarta, 14 Juni 2026 - Diskusi publik INDEF mengenai “Daya Beli Tertekan, Ketahanan Ekonomi Dipertaruhkan” menyoroti kondisi realitas ekonomi masyarakat Indonesia di tengah ketahanan ekonomi yang terus bergejolak, ditandai dengan menyusutnya 9,4 juta jiwa kelas menengah dalam lima tahun terakhir serta pelemahan nilai tukar Rupiah. Fenomena paradoks ini terlihat jelas dari penurunan konsumsi publik bahkan pada kelompok kebutuhan pokok, otomotif, properti, dan sektor riil lainnya yang diperburuk oleh tekanan fiskal.

Wahyu Tri Utomo-Data Scientist Continuum, memaparkan hasil analisis media sosial terkait lonjakan harga BBM Pertamina yang naik drastis sebesar 32% (dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter) pada 10 Juni 2026. Berdasarkan pengolahan data masif sebanyak 648.723 interaksi yang dikumpulkan dari platform X (Twitter), YouTube, dan Threads selama periode singkat 9-11 Juni, dengan mengeluarkan sentimen netral (hanya membandingkan sentimen positif dan negatif), ditemukan bahwa 98,12% respons publik bersifat negatif. Emosi kemarahan (85,37%) menjadi reaksi yang paling dominan karena publik merasa kecewa terhadap ketidakkonsistenan narasi pemerintah terkait harga BBM serta kondisi ekonomi nasional yang dianggap sedang tidak baik-baik saja akibat pelemahan Rupiah dan anjloknya IHSG, dan yang terbaru kenaikan harga BBM non-subsidi.

Wahyu menyebutkan fokus utama perbincangan netizen justru tertuju pada nasib Peralite (50,98%), yang memicu kekhawatiran akan terjadinya kelangkaan stok akibat peralihan pola konsumsi (*shifting*) pengguna Pertamina ke Peralite atau penghapusan produk tersebut dari pasar mengikuti jejak Premium. Selain itu, hasil analisis mengungkapkan kritik tajam terhadap Pertamina serta aksi (*recall*) terhadap akun @gerindra mengenai sikap vokal mereka di masa lalu saat masih menjadi oposisi, sementara publik memperingatkan adanya efek domino pada rantai pasok yang akan menaikkan harga kebutuhan pokok bagi seluruh lapisan masyarakat.

Wahyu menyimpulkan bahwa meskipun kenaikan ini menasar BBM non-subsidi, dampaknya tetap menjadi "pukulan tambahan" yang memberatkan seluruh lapisan masyarakat baik secara langsung atau tidak langsung. Hal ini terlihat dari narasi netizen dalam media sosial yang menegaskan bahwa lonjakan biaya energi tetap berpotensi akan memicu kenaikan biaya logistik UMKM serta harga pangan secara luas. Wahyu menambahkan bahwa seluruh gejolak digital ini merupakan cerminan nyata dari kondisi sosial yang ada di masyarakat saat ini.

M. Rizal Taufikurrahman - Kepala Center of Macroeconomics and Finance, berpandangan bahwa tantangan utama RAPBN 2027 bukan hanya mengejar target pertumbuhan ekonomi 5,8–6,5%, tetapi memastikan kualitas pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi belanja negara. Setiap rupiah anggaran harus mampu menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian, mendorong investasi yang produktif, memperkuat daya saing, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Di sisi lain, penyesuaian harga BBM non-subsidi sebagai konsekuensi pengurangan subsidi energi berpotensi menekan konsumsi rumah tangga, terutama kelompok kelas menengah yang selama ini menjadi motor utama pertumbuhan konsumsi namun relatif tidak terlindungi oleh program bantuan sosial. Apabila terjadi pergeseran konsumsi ke Peralite dalam skala besar,

tekanan inflasi memang dapat lebih terkendali, tetapi konsekuensinya adalah meningkatnya beban subsidi energi yang pada akhirnya mempersempit ruang fiskal pemerintah.

Penguatan kredibilitas fiskal perlu dilakukan melalui optimalisasi penerimaan negara berbasis digitalisasi perpajakan, peningkatan kualitas belanja dengan prinsip *spending better*, pengelolaan defisit dan utang yang lebih hati-hati, serta penguatan kapasitas fiskal pemerintah daerah. RAPBN 2027 seharusnya menjadi instrumen transformasi ekonomi yang tidak hanya menjaga stabilitas makro, tetapi juga melindungi daya beli masyarakat, mempercepat hilirisasi industri, memperkuat UMKM, dan menciptakan lapangan kerja yang lebih produktif.

Terakhir, keberhasilan RAPBN 2027 tidak semata diukur dari tingginya angka pertumbuhan ekonomi, melainkan dari kemampuannya menjaga keseimbangan antara disiplin fiskal, stabilitas makroekonomi, dan pertumbuhan yang inklusif sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Nur Hidayah - Kepala Center for Sharia Economic Development, menyampaikan bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini sedang mengalami paradoks antara pertumbuhan 5% yang terlihat sehat "di atas kertas" dengan realitas yang sangat tertekan "di lapangan". Fenomena ini ditandai dengan erosi keamanan ekonomi yang nyata, di mana kelas menengah menyusut hingga 9,4 juta jiwa dalam lima tahun terakhir serta melemahnya nilai tukar Rupiah yang ia sebut sebagai indeks kepercayaan investor terhadap kualitas institusi dan konsistensi kebijakan domestik. Pasar merespons negatif bukan hanya karena faktor global, melainkan karena keraguan terhadap mesin pertumbuhan baru, ruang fiskal yang sempit untuk membiayai agenda besar pemerintah, serta ketidakpastian hukum yang lebih ditakuti investor daripada risiko ekonomi biasa.

Di tengah gejolak tersebut, Nur menyoroti kegagalan ekonomi syariah yang belum mampu menjadi peredam kejut (*shock absorber*) bagi ekonomi nasional meskipun memiliki total aset yang masif mencapai hampir Rp3.000 triliun. Nur mengkritik lima sektor keuangan syariah yang dinilai masih rapuh, terfragmentasi, dan ikut bergejolak mengikuti siklus konvensional, terutama perbankan syariah yang pangsa pasarnya stagnan di angka 7% selama tiga dekade serta penyerapan zakat yang baru mencapai 15% dari potensinya. Oleh karena itu, ia merekomendasikan transformasi orkestrasi nasional melalui digitalisasi dana umat, reposisi perbankan syariah untuk memperkuat UMKM, serta pemanfaatan instrumen ZISWAF sebagai jaring pengaman bagi kelas menengah dan korban PHK guna menjaga martabat ekonomi masyarakat.

Nur Komaria - Peneliti Center of Digital Economy and SMEs, menekankan bahwa UMKM saat ini terjepit oleh tekanan dari tiga arah utama, yaitu lonjakan harga BBM, struktur biaya platform digital yang membebani margin, serta lemahnya daya saing terhadap produk impor. Kenaikan harga Pertamina sebesar 32% memberikan dampak langsung pada biaya operasional dan logistik pelaku UMKM di sektor jasa kurir, kuliner, dan ritel perkotaan yang sangat bergantung pada mobilitas harian. Kondisi ini diperparah dengan tantangan struktural berupa sulitnya akses pendanaan formal, yang tercermin dari penurunan pangsa kredit UMKM dari 22% pada 2021 menjadi 17,5% pada 2025, serta meningkatnya rasio kredit bermasalah (NPL) hingga 4,33%.

Ria menegaskan bahwa UMKM masih menghadapi persoalan struktural yang belum terselesaikan, terutama terkait akses pembiayaan, biaya modal yang tinggi, rendahnya produktivitas, serta keterbatasan kapasitas digital dan manajerial. Tekanan terhadap UMKM

semakin meningkat dari sisi biaya operasional akibat kenaikan harga BBM yang berpotensi menaikkan biaya logistik, distribusi, dan layanan usaha. Selain itu, target UMKM untuk "naik kelas" masih menghadapi lima hambatan utama, yaitu keterbatasan modal, tingginya biaya platform digital, beban formalisasi usaha, rendahnya kualitas SDM dan literasi digital, serta lemahnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, keberlanjutan UMKM wajib didukung oleh regulasi dan ekosistem yang terintegrasi antara pembiayaan, logistik, digitalisasi, penguatan kapasitas usaha, dan perluasan akses pasar.

Andry Satrio Nugroho - Kepala Center of Industry, Trade, and Investment, menyoroti terjadinya fenomena pengetatan likuiditas yang dipicu oleh perilaku perbankan yang lebih memilih memarkir dana di instrumen SRBI (Sekuritas Rupiah Bank Indonesia) demi mengejar imbal hasil tinggi dan bebas risiko, daripada menyalurkan kredit ke sektor industri. Hal ini mengakibatkan permintaan kredit modal kerja dan investasi anjlok tajam, yang mencerminkan pesimisme dunia usaha di tengah kinerja manufaktur Indonesia yang stagnan dengan PMI di level 50,0, tertinggal dibandingkan negara tetangga seperti Vietnam dan Singapura.

Andry menjelaskan bahwa kondisi daya beli masyarakat saat ini kian "letih", yang ditandai dengan penurunan konsumsi bahkan pada kelompok kebutuhan pokok seperti makanan dan minuman, serta pelemahan signifikan di pasar otomotif dan properti. Untuk memitigasi risiko tersebut, ia mendesak pemerintah agar melakukan disiplin pengelolaan APBN dengan mengalihkan belanja barang konsumsi ke belanja modal yang lebih produktif guna menggerakkan industri bahan bangunan. Andry merekomendasikan adanya kalibrasi ulang bauran moneter agar upaya stabilisasi Rupiah tidak mematikan likuiditas industri, serta pemberian bantalan fiskal bagi kelas menengah untuk menjaga stabilitas permintaan domestik dan mencegah mereka jatuh ke kelas rentan miskin.

Abra Talattov - Kepala Center of Food, Energy, and Sustainable Development, menekankan kenaikan harga Pertamina sebesar 32,1% per 10 Juni 2026 merupakan konsekuensi logis dari melonjaknya harga minyak mentah dunia (ICP mencapai 91,8 USD/barel) serta pelemahan nilai tukar Rupiah yang sempat menyentuh Rp17.789 per USD. Meskipun harga telah disesuaikan menjadi Rp16.250 per liter, angka tersebut sebenarnya belum menutup harga keekonomian riil yang diperkirakan berada di level Rp20.000 hingga Rp21.000 per liter, sehingga badan usaha masih menanggung selisih sekitar Rp3.570 per liter. Kondisi ini menciptakan dilema antara rasionalitas bisnis dan perlindungan konsumen, terutama bagi kelas menengah yang sangat sensitif terhadap biaya transportasi yang porsinya mencapai 12–16% dari total pengeluaran rumah tangga mereka.

Abra memperingatkan adanya risiko migrasi konsumen secara masif dari Pertamina ke Paltalite karena selisih harga yang kini melebar hingga 62% atau sekitar Rp6.250 per liter, yang berpotensi menyebabkan kuota Paltalite jebol sebelum akhir tahun. Untuk memitigasi dampak tersebut, Abra merekomendasikan pemerintah untuk meningkatkan transparansi formula harga BBM agar masyarakat memahami dinamika pasar, serta segera merampungkan revisi Perpres 191/2014 untuk memastikan subsidi tepat sasaran karena saat ini 36% subsidi masih dinikmati kelompok masyarakat mampu. Abra juga menekankan pentingnya pemberian stimulus bagi pekerja dengan upah mendekati UMR dan penguatan subsidi transportasi publik (PSO) guna menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi energi.

Narahubung: Sarwo Edi (+62 813-8047-7878)